EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2015 MENGENAI MUSEUM PADA MUSEUM MPU TANTULAR

¹ Endik Hidayat, ² Jennifer, ³ Dewi Rahmawati, ⁴ Nesy Hari Pratiwi

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email : endik.hidayat.adneg@upnjatim.ac.id, Jenniferjee15@gmail.com,
Surabaya, 60294, Indonesia

Abstract

The Mpu Tantular Museum is one of the cultural heritages in the city of Sidoarjo which provides various artifacts and relics of the kingdom and the ancestors of the Indonesian nation, especially in the city of Surabaya and Sidoarjo. The implementation of Government Regulation No.66 of 2015 concerning museums is a rule that must be obeyed by the museum managers. But today there are still many museums in Indonesia that are not maintained and even neglected, this shows that there is an error in the implementation of these regulations. In this study using a qualitative descriptive method with a literature study approach. Researchers used observation techniques, interviews in making this study, the results of the study showed that there were several causes and obstacles that occurred in the running of the Mpu Tantular museum activities, namely the influence of globalization and also the influence of the Covid-19 pandemic which made no visitors come to the museum. thus reducing the income budget that is commonly used in managing, maintaining and providing salaries for employees.

Keywords: Barriers; Implementation; Museum, Government regulations; Policy Evaluation

Abstrak

Museum Mpu Tantular merupakan salah satu cagar budaya yang terdapat di kota Sidoarjo yang menyediakan berbagai artefak dan benda-benda peninggalan kerajaan dan para leluhur bangsa Indonesia terutama di Kota Surabaya dan Sidoarjo. Implementasi Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2015 Tentang museum merupakan aturan yang harus ditaati oleh para pengelola museum tersebut. Tetapi dewasa ini masih banyak museum-museum di Indonesia yang tidak terawat bahkan terbengkalai, hal tersebut menunjukkan adanya kesalahan dalam implementasi peraturan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literature. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dalam membuat penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa penyebab dan hambatan yang terjadi dalam berjalannya kegiatan museum Mpu Tantular, yaitu pengaruh dari globalisasi dan juga pengaruh dari pandemic Covid-19 yang membuat tidak ada pengunjung yang datang ke museum tersebut sehingga menurunkan anggaran pemasukan yang biasa digunakan dalam menata, merawat, dan memberi gaji karyawan.

Keywords: Evaluasi Kebijakan; Implementasi; Museum, Peraturan Pemerintah

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>
Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki ragam budaya dan tradisi yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Budaya di Indonesia meliputi seni, music, dan permainan tradisional yang dimana tradisi tersebut masih sangat terjaga dengan baik akibat masih banyaknya pihak-pihak yang peduli terhadap budaya Indonesia tersebut. Peninggalan-peninggalan kerjaan serta artefak-artefak zaman dahulu yang telah ditemukan oleh beberapa arkeolog membuktikan bahwa banyaknya situs dan warisan leluhur Indonesia yang masih banyak tersimpan dan belum ditemukan. Terdapat beberapa barang peninggalan kerajaan-kerajaan dimulai dari lata makan, baju pakaian, hingga senjata-senjata yang saat ini tersimpan rapi di beberapa museum di Indonesia.

Museum merupakan tempat dimana penyimpanan barang-barang peninggalan bersejarah, dimana peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut dapat dijadikan sarana edukasi bagi generasi ke generasi untuk mengetahui sejarah terdahulu yang pernah terjadi di Indonesia. salah satu museum yang menyajikan peninggalan bersejarah yaitu museum Mpu Tantular. Museum Mpu Tantular merupakan sebuah tempat yang menyimpan beberapa artefak bersejarah seperti emas yang dibuat zaman dahulu, senjata, lukisan, serta berbagai peninggalan bersejarah lainnya yang tersimpan rapi didalam museum Mpu Tantular tersebut.

Sejak berdirinya museum Mpu Tantular pada tahun 1937, hingga saat ini museum tersebut menjadi tempat bersejarah bagi masyarakat Sidoarjo, karena museum tersebut menampilkan beberapa hasil arkeologi yang menunjukkan sejarah Surabaya dan Sidoarjo pada saat zaman dahulu kala. Ini menjadi suatu edukasi bagi masyarakat terutama bagi para pelajar guna mengemban ilmu mengenai sejarah kota asal mereka. Museum Mpu Tantular sendiri telah menjadi sarana edukasi bagi para pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat lainnya yang ingin mengetahui sejarah panjang kota Surabaya dari zaman kerajaan hingga terbentuknya kota Surabaya.

Setiap sarana wisata tentunya terdapat regulasi mengenai perizinan tempat hingga regulasi berupa kebijakan dan aturan mengenai tempat tersebut. Menurut Undang-Undang no.66 Tahun 2015 Tentang museum mengatakan bahwa museum merupakan cagar budaya yang harus dijaga oleh masyarakat dan pemerintah guna untuk dijadikan sarana edukasi bagi masyarakat. Dari peraturan tersebut menetapkan bahwa museum menjadi tempat atau lembaga yang menyediakan sarana pengetahuan bersejarah agar masyarakat dapat mengenal sejarah serta tidak melupakan sejarah. Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai museum tersebut, menjadikan kewajiban bagi setiap lembaga yang terkait dengan keberlangsungan museum tersebut untuk menjaga serta mengawasi jalannya kegiatan museum tersebut meliputi perawatan, hingga pengawasan.

Museum Mpu Tantular pada saat ini sudah tidak menjadi tempat wisata yang digemari oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena kondisi museum tersebut sudah tidak terawat dengan baik, dibuktikan dari banyaknya fasilitas yang sudah tidak mempunyai dan kondisi lingkungan yang sudah tidak memadai untuk dijadikan wisata edukasi bagi masyarakat. Hal tersebut terdapat dalam peraturan pemerintah yang menegaskan bahwa pihak yang terkait dalam keberlangsungan museum wajib menjaga serta mengawasi museum tersebut, tetapi kenyataannya terjadi pada museum Mpu Tantular yang hingga saat ini kondisinya memprihatinkan.

Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2010 dalam pasal 3 mengatakan bahwa perlindungan terhadap benda atau artefak peninggalan sejarah wajib dijaga karena aturan tersebut menegaskan bahwa cagar budaya adalah warisan bangsa manusia yang ada di Indonesia (Dewi:2016), apabila cagar budaya tersebut tidak dilestarikan sedemikian rupa, maka sejarah yang seharusnya dijadikan wahana edukasi bagi masyarakat menjadi berkurang minatnya. Masyarakat merupakan target sasaran edukasi bagi lembaga museum cagar budaya yang dimana bertujuan memberikan edukasi sejarah. Karena hal ini sangatlah penting, bahkan Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno pernah menegaskan bahwa siapapun kita tidak boleh melupakan sejarah, maka dari itu pentingnya menjaga cagar budaya untuk mengingat sejarah masa lalu Indonesia.

Minat masyarakat untuk mengunjungi museum Mpu Tantular saat ini menjadi berkurang, hal tersebut telah dijelaskan karena kondisi dan situasi museum Mpu Tantular sudah tidak memadai seperti sebelumnya. Pengunjung museum Mpu Tantular mayoritas merupakan pelajar hingga mahasiswa yang bertujuan untuk mempelajari serta mengetahui sejarah panjang kota Surabaya dilihat dari peninggalan-peninggalan yang masih tersimpan awet dalam museum Mpu Tantular (Sabikhis&Fithroni,2021). Penyebab menurunnya minat kunjung pada museum Mpu Tantular didasari oleh kondisi museum yang sudah tidak terawat dan juga saat ini kebanyakan masyarakat terutama generasi muda lebih memilih untuk *browsing* mengenai sejarah tanpa melihat ke tempatnya langsung yang menyediakan artefak bersejarah yang asli. Hal tersebutlah yang menyebabkan menurunnya minat kunjung ke museum Mpu Tantular.

Perlu diadakannya sebuah evaluasi mengenai peraturan pemerintah tentang museum seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No.66 Tahun 2015 Tentang museum. Karena aturan tersebut tidak secara tegas memberikan aturan untuk perawatan hingga pembenahan kondisi museum saat ini, aturan tersebut hanya membahas mengenai aturan keberlangsungan museum tanpa ada aturan tentang perawatan museum. Maka dari itu dalam hal perawatan museum masih belum terdapat regulasi yang jelas, saat ini yang terjadi pada museum Mpu Tantular merupakan perawatan secara sukarela dari pihak yang

menjaga dan bekerja di museum Mpu Tantular itu sendiri tanpa adanya bantuan dari lembaga pemerintahan.

Dalam penelitian dari Amanda dan Supriharjo (2012) pelestarian cagar budaya merupakan salah satu langkah dalam pendekatan atau perencanaan suatu penataan ruang. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2005 Tentang pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya, pelestarian bangunan atau tempat cagar budaya merupakan bentuk dari penjagaan keaslian lingkungan dan bangunan agar terjaga nilai sejarahnya, peraturan tersebut menyinggung mengenai pemeliharaan serta perlindungan terhadap tempat cagar budaya agar menjadikan tempat tersebut menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke tempat cagar budaya. Menurut Amanda dan Supriharjo (2012) pelestarian cagar budaya tersebut dapat dilakukan oleh partisipasi masyarakat sendiri, karena dengan memberikan pelestarian terhadap cagar budaya itu sendiri, dengan bantuan partisipasi dari masyarakat maka pelestarian cagar budaya tersebut akan terbilang efisien, karena dengan adanya dorongan dari masyarakat akan menimbulkan motivasi dan minat yang tinggi pada masyarakat itu sendiri dalam upaya menjaga dan membenahi cagar budaya agar kembali eksis ditengah masyarakat. Pasalnya apabila masyarakat tidak ikut serta dalam pelestarian cagar budaya maka minat kunjung masyarakat akan berkurang sehingga dampak yang akan diterima oleh museum cagar budaya akan buruk.

Evaluasi terhadap peraturan pemerintah No.66 Tahun 2015 Tentang museum masih menjadi PR bagi pemerintah dalam upaya mengembalikan nilai serta eksistensi terhadap museum-museum yang terdapa di Indonesia khususnya museum Mpu Tantular. Karena museum Mpu Tantular sendiri memberikan fasilitas yang berkebudayaan, seperti terdapatnya permainan tradisional. Fasilitas tersebut bertujuan untuk mengenalkan masyarakat terutama anak-anak mengenai permainan tradisional yang ada di Indonesia. Tetapi hal tersebut menjadi menurun karena kondisi museum yang sudah tidak seperti dahulu lagi membuat minat masyarakat untuk berkunjung menjadi berkurang. Inilah pentingnya evaluasi peraturan untuk memberikan kebijakan yang baru terkait museum di Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas, Museum Mpu Tantular merupakan salah satu museum yang menyediakan artefak serta peninggalan bersejarah yang memiliki nilai filosofis yang tinggi. Keadaan museum Mpu Tantular saat ini sudah tidak semenarik dahulu, karena perawatan yang kurang terhadap museum tersebut menjadikan minat kunjung pada masyarakat berkurang, ditambah saat ini masyarakat lebih terfokuskan pada teknologi yang membuat eksistensi museum menurun. permasalahan lainnya terdapat dalam Undang-Undang yang menaungi lembaga museum, tetapi peraturan tersebut dirasa kurang efektif karena masih membahas mengenai peraturan keberlangsungan dan perintah terhadap penjagaan atau pengawasn kinerja museum tersebut. Dari pembahasan latar belakang diatas maka penulis

tertarik untuk mengkaji "Evaluasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2015 Mengenai Museum pada Museum Mpu Tantular". secara khusus kajian tulisan ini untuk mengetahui Apa yang menyebabkan museum Mpu Tantular tidak kembali eksis seperti dahulu ? apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam keberlangsungan jalannya kegiatan museum Mpu Tantular ? dan mengapa diperlukannya evaluasi terhadap peraturan pemerintah No.66 Tahun 2015 mengenai museum ?

KAJIAN LITERATUR

Teori Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan sebuah tempat dimana terdapat banyak koleksi dari beberapa barang peninggalan sejarah yang tersimpan dan tertata rapi dalam susunan yang diberikan penjelasan terkait benda tersebut guna dijadikan sebagai suatu edukasi bersejarah bagi masyarakat (Charter:1992). Cagar budaya merupakan sebuah tempat yang harus dijaga kelestariannya karena cagar budaya sendiri memiliki peran penting dalam keberlangsungan pendidikan sejarah bagi masyarakat. perlunya revitalisasi terhadap cagar budaya guna menjaga dan merawat segala fasilitas yang terdapat didalamnya terutama benda-benda bersejarah yang dipajang didalam sebuah cagar budaya.

Menurut Rahmawati (2018) cagar budaya merupakan tempat peninggalan bersejarah, benda bersejarah, dan artefak-artefak peninggalan leluhur yang dimana merupakan tempat yang wajib dijaga keutuhannya dan keasliannya guna menjadi bahan pendidikan sejarah bagi masyarakat. Cagar budaya merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan harus dilestarikan karena tanpa adanya cagar budaya tersebut kita tidak akan mengetahui jejak peninggalan leluhur kita pada zaman dahulu, dan cagar budaya merupakan bentuk fisik dari peninggalan terdahulu yang dimana kita dapat mengetahuinya saat ini.

Terdapat beberapa regulasi dari aturan yang terdapat di Indonesia mengenai cagar budaya tersebut yaitu :

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya bahwa cagar budaya merupakan benda hasil kekayaan budaya yang dimiliki bangsa yang memiliki arti yang sangat penting untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mengenai ilmu sejarah. Cagar budaya pun salah satu bentuk fisik dari jati diri bangsa yang harus dijaga kelestariannya untuk kepentingan negara dan bangsa. (Sumber: http://www.pskbpi.its.ac.id/wp-content/uploads/FGD_PSKBPI_2_Undang-undang-No.-11-tahun-2010.pdf)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menetapkan bahwa cagar budaya adalah milik negara dan milik negara, serta merupakan perwujudan dari gagasan dan kemajuan masa lalu. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa cagar budaya mengacu pada berbagai bentuk benda, bangunan, dan reruntuhan.

Tinggi -Nilai peninggalan budaya harus dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjaga keutuhan dan keaslian peninggalan budaya sejarah tersebut. (Sumber: https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/UU_Tahun2010_Nomor11.pdf)

Pengertian tersebut menyatakan bahwa cagar budaya merupakan sebuah situs, benda, dan tempat yang memiliki nilai yang tinggi, dan patut dijaga kelestariannya dengan tujuan sebagai tempat edukasi sejarah bagi masyarakat. Perlindungan terhadap cagar budaya tersebut wajib dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan kebudayaan dan juga lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kewajiban dalam menjaga serta melestarikan cagar budaya. Terdapat regulasi mengenai pelestarian cagar budaya ini guna keberlangsungan dan menjaga keaslian dari agar budaya tersebut. Seperti yang terdapat dalam surat keputusan Wali Kota Surabaya Tentang perlindungan dan pelestarian cagar budaya yang dilakukan di lingkungan Surabaya, terhadap bangunan serta lingkungan cagar budaya tersebut. (Sumber: https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/kepwali_5.pdf)

Teori Konservasi

Pengertian perlindungan atau konservasi dapat mencakup semua kegiatan pemeliharaan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kondisi setempat. Kegiatan konservasi juga dapat mencakup lingkup perlindungan, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi. Perlunya perlindungan itu perlu. Selain mengadvokasi perlindungan dan pembangunan partisipatif, pendidikan perlindungan juga sangat mendesak. Nilai konservasi yang perlu dikembangkan dan dipertahankan adalah nilai budidaya, pemanfaatan, pelestarian dan penelitian baik fisik maupun non fisik. Kampanye perlindungan adalah kerja kolektif dan tidak bisa dilakukan sendiri. Selain itu, gerakan perlindungan hendaknya tidak menjadi gerakan eksklusif, tetapi bagaimana membangun gerakan perlindungan yang mendapat dukungan dan partisipasi public (Rachman:2012).

Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan komponennya yang merupakan ketahanan pangan masa depan, kesehatan, dan sumber energi umat manusia. Indonesia memiliki potensi tersebut dan berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan konservasi dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang efektif untuk mengatasi laju kerusakan dan hilangnya keanekaragaman hayati yang telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Saat ini, kerangka hukum perlindungan keanekaragaman hayati nasional berpusat pada UU No.3. Strategi Konservasi Alam Dunia IUCN (1980) disetujui pada Mei 1990, dan strateginya telah mengalami perubahan mendasar di panggung internasional (Samedi: 2012). Burra Charter (1999) mengatakan konservasi merupakan bentuk proses dari pengelolaan suatu tempat yang memiliki nilai sejarah yang tinggi serta memiliki nilai kultur yang sangat tinggi.

Undang-Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengatakan konservasi atau perlindungan adalah upaya dinamis untuk menjaga warisan budaya dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; dalam "Piagam Selandia Baru ICOMOS" (2010), perlindungan adalah pengertian dan seluruh proses melindungi budaya. Jaga tempat yang melindungi nilai warisan budayanya. Perlindungan didasarkan pada penghormatan terhadap materi, koneksi, makna, dan penggunaan tempat. Dibutuhkan pendekatan yang bijaksana dan melakukan pekerjaan yang diperlukan sambil mempertahankan keaslian dan integritasnya untuk memastikan bahwa situs dan nilainya diteruskan ke generasi mendatang.

Tujuan perlindungan atau konservasi adalah untuk memelihara dan mengekspresikan nilai-nilai tersebut, serta mendukung keberlanjutan makna nilai-nilai warisan budaya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Perlindungan suatu tempat harus didasarkan pada pemahaman dan penghayatan seluruh aspek nilai warisan budaya, baik berwujud maupun tidak berwujud. Menggunakan berbagai bentuk pengetahuan dan perangkat yang tersedia untuk memahami status dan nilai warisan budaya. Nilai warisan budaya harus dipahami melalui konsultasi dengan pengawas, dokumentasi sistematis, penelitian lisan, survei fisik dan catatan lapangan, dan metode terkait lainnya.

Perlindungan sumber daya alam dan lingkungan (KSDAL) menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia, karena dampak ekologis dari berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah administrasi pemerintahan negara. Oleh karena itu, upaya konservasi harus menjadi bagian integral dari pembangunan. Perkembangan suatu negara akan mempengaruhi kepentingan negara lain maupun kepentingan internasional.

Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, perlindungan sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang harus digunakan secara bijak untuk menjamin keberlanjutan pasokannya, dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (Christanto: 2020).

Teori Restorasi

Restorasi merupakan sebuah proses dimana dalam pelaksanaannya membuat sebuah tiruan yang sangat menyerupai benda aslinya. Tujuan dari restorasi ini adalah untuk menjaga keaslian barang atau benda yang sudah berusia sangat tua sehingga mudah rusak dan juga sebagai suatu bentuk dari pengawasan terhadap benda bersejarah (Ningrum,dkk,2016). Pengertian tersebut dapat diartikan sebagai sebuah pembuatan kembali yang dimana pembuatan tersebut mengikuti dari benda aslinya, sehingga untuk dipajang atau diperlihatkan kepada masyarakat yaitu benda hasil restorasi dari benda aslinya. Contoh rstorasi yaitu pada bendera kemerdekaan RI yang dijahit oleh ibu Fatmawati yang saat ini bendera tersebut tersimpan rapi di museum monas, tetapi akibat dimakan usia,

kain bendera tersebut sudah rapuh dan mudah rusak sehingga dibuat restorasi bendera tersebut agar masyarakat dapat tetap melihat bendera tersebut meskipun itu restorasi.

Restorasi adalah sebuah tindakan yang memiliki tujuan untuk mengembalikan bentuk dan detail dari suatu benda secara akurat, atau restorasi dapat berupa melengkapi bagian-bagian dari benda tersebut yang hilang atau sudah rusak (Murtagh:1988). Menurut Murtagh bahwa restorasi merupakan mengembalikan bagian-bagian yang telah hilang atau rusak dari bagian benda tersebut. Restorasi ini bertujuan untuk mengembalikan bentuk asli dari suatu benda yang memiliki nilai sejarah tinggi, sehingga masyarakat dapat melihat bentuk asli dari benda bersejarah tersebut. Contohnya seperti misalkan sebuah mahkota raja yang terbuat dari emas, terdapat bagian yang hilang, maka perlu direstorasi agar bentuknya kembali seperti semula dengan mengembalikan bagian yang sudah hilang.

Dari beberapa pengertian menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa restorasi merupakan pengembalian bagian-bagian yang hilang dari sebuah benda bersejarah yang bertujuan mengembalikan bentuk aslinya sehingga dapat dilihat secara seksama oleh masyarakat untuk mengetahui bentuk benda tersebut. Hal ini sangat penting untuk menarik minat edukasi, karena apabila masyarakat melihat benda tersebut sudah rusak, maka mereka tidak akan tertarik untuk melihatnya, sebaliknya apabila benda tersebut masih utuh dan masih bagus, maka minat masyarakat untuk melihat benda tersebut pun dapat meningkat.

Konsep Evaluasi dan Implementasi Kebijakan

Evaluasi sangat diperlukan terutama dalam segala kegiatan yang melibatkan banyak orang dan memiliki tujuan tertentu. Evaluasi sebagai bentuk dari memperbaiki kinerja yang kurang baik agar menjadi lebih baik, serta untuk mengetahui kesalahan dalam setiap proses kinerja tersebut untuk diperbaiki agar menjadi lebih baik. Dalam hidup seseorang pun evaluasi sangat penting, karena disadari atau tidak, kita selalu melakukan kesalahan yang terkadang tidak kita sadari, maka dari itu untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik perlu dilakukannya sebuah evaluasi pada diri sendiri.

Terdapat pendapat dari Siregar dan Nara (2011) yang mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses dimana seseorang menilai seseorang dari patokan-patokan tertentu yang menjadi penilaiannya. Evaluasi pun dapat dikatakan sebagai bentuk penilaian dari sebuah proses dengan menggunakan patokan tertentu sebagai bahan penilaiannya. Evaluasi tersebut dapat dimaksudkan sebagai bentuk penilaian agar menjadi lebih baik tetapi dengan patokan atau kriteria yang menjadi bahan pertimbangan penilaian tersebut.

Evaluasi dilaksanakan dengan cara objektif, kooperatif, efektif, dan juga secara komprehensif. Karena evaluasi itu sendiri digunakan untuk menata sebuah gradasi dari kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang akan dilihat dan dinilai oleh

banyak orang (Soetopo:2005). Pengertian tersebut berarti bahwa sebuah evaluasi merupakan bentuk dari penilaian kinerja seseorang dalam melakukan sebuah tindakan yang dilakukannya guna mencapai tujuan tertentu.

Terdapat beberapa macam jenis evaluasi menurut Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 Tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, yaitu input, output, dan outcome

(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49168#:~:text=PP%20No.%2039%20Tahun%202006,Rencana%20Pembangunan%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>).

Jenis evaluasi tersebut untuk mengkaji kembali dari hasil yang telah masuk kepada internal suatu lembaga lalu dikaji kembali agar menjadi sebuah output dimana output ini menjadi hasil dari input yang telah masuk, dan outcome merupakan pengeluaran selama kegiatan evaluasi dilaksanakan.

Dalam mengkaji studi implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel-variabel atau faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa model implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan, diantaranya adalah sebagai berikut;

Grindle (1980) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15) dijelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan. Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) Dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik dan dana yang dialokasikan, serta b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; dan b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi. Lebih lanjut, menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (*implementability*) dari kebijakan tersebut. Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek konteks implementasi kebijakan (*contexts of policy implementation*). (Supriadin et al., 2020)

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah bentuk dari penilaian organisasi, lembaga, atau seseorang dalam melakukan sebuah pelaksanaan kegiatan yang dimana merujuk pada aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi bertujuan untuk mencari apa yang menjadi kekurangan dalam setiap

kegiatan, evaluasi pun dapat diberikan kepada sebuah aturan atau kebijakan yang dianggap kurang dalam memberikan aturan.

Secara keseluruhan ruang lingkup kajian dalam tulisan ini menjelaskan bahwa Implementasi peraturan memang perlu dievaluasi guna untuk mencapai kemaslahatan bersama dan untuk menjaga kembali nilai eksistensi pada museum di Indonesia khususnya museum Mpu Tantular. Dimana perkembangan museum Mpu Tantular tersebut menjadi sangat berkurang karena perawatannya yang kurang dan tidak adanya kunjungan dari masyarakat yang menjadi target utama museum Mpu Tantular. Maka dari itu perlu diadakannya sebuah evaluasi terhadap aturan pemerintah No. 66 Tahun 2015 Tentang museum itu sendiri, agar museum-museum di Indonesia dapat kembali survive dalam menghadapi kemajuan global saat ini, serta dapat menarik kembali minat masyarakat.

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

(Sumber : Data Hasil Penelitian 2021)

METODOLOGI

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Museum MPU Tantular yang terletak di Jl Raya Buduran Kec Buduran Sidoarjo, tepatnya di sebelah barat Jembatan Layang Buduran.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menemukan teori atau pengetahuan dalam waktu tertentu (Muhktar, 2013). Metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mencari atau menemukan teori bukan untuk menguji teori jadi metode ini mengamati sebuah gejala yang terjadi dilapangan serta menganalisisnya dan menilai permasalahan tersebut dan menuangkan penilaian tersebut dalam sebuah tulisan dengan memberikan gambaran dan situasi dilapangan dengan rinci.

Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan secara mendeskripsikan suatu permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam bentuk gambaran atau bahasa. Metode ini memberikan kemudahan

pada peneliti karena penelitian menggunakan teknik sampling pada subjek dan objek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti untuk memenuhi kriteria penelitian agar penelitian ini dapat relevan. Dalam penelitian deskriptif kualitatif peneliti harus melakukan observasi secara mendalam ke lapangan untuk menganalisis secara mendalam serta mampu mengembangkan pernyataan yang relevan. Karena metode ini merupakan pendekatan penelitian yang mengumpulkan data dengan menggunakan kata-kata dan bahasa bukan dalam bentuk angka (Moleong, 2005).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literature. Studi literature menurut Sugiyono (2015) yaitu studi kepustakaan dengan mencari serta menganalisis dari penelitian atau buku bahkan dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut dilakukan guna mengrelevansikan penelitian dengan penelitian sebelumnya untuk mencari fakta dari data-data yang telah diperoleh peneliti. .

Teknik pengumpulan data dalam dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan penguji peristiwa (Moleong, 2007:161). Dari dokumen tersebut kemudian dilakukan pengkajian terhadap isinya, sehingga diperoleh kesimpulan (Moleong, 2002: 163).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik induktif yang dilakukan dari awal sampai akhir pengumpulan data yang bersifat terbuka. Analisis data ini digunakan untuk menilai menganalisis data yang telah difokuskan dalam penelitian yaitu mengenai " Evaluasi Kebijakan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2015 Mengenai Museum Pada Museum Mpu Tantular" dengan cara menganalisis dan menyajikan dalam bentuk data deskriptif melalui langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut: Reduksi Data, Unitasi dan Kategorisasi, Display Data dan Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal terbentuknya museum Mpu Tantular memiliki nama Museum Negeri Provinsi Jawa Timur Mpu Tantular yang telah didirikan sejak tahun 1933 oleh bangsawan Belanda bernama Von Faber. Pada mulanya museum ini hanya memajang kolek pribadi dari Von Faber di Readhuis Ketabang, kemudian Von Faber bertemu seorang janda bernama Han Tjong King yang sangat baik hati memberikan bangunan serta lahan yang lebih luas di jalan Tegalsari. Dengan inisiatif masyarakat maka museum dipindahkan ke tempat yang lebih memadai dan strategis di jalan Pemuda No.3 Surabaya dan didirikan pada tanggal 25 Juni 1937 (Dinas Kebudayaan Jawa Timur, 2006). Ketika Von Feber meninggal dunia maka museum diambil alih dan dikelola oleh pihak Yayasan Pendidikan yang didukung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan pada akhirnya museum dibuka untuk umum pada tahun 1973 dengan nama museum Jawa Timur. Seiring berkembangnya waktu

perubahan demi perubahan terjadi pada museum Jawa Timur atau Museum Mpu Tantular, seperti bertambahnya koleksi yang semakin banyak dan juga banyaknya berbagai kegiatan yang bertemakan edukasi budaya.

Bertambahnya koleksi di museum Mpu Tantular membuat pihak pengelolaan perlu meluaskan wilayah museum agar dapat menampung banyaknya koleksi di museum tersebut, karena hal itu tempat museum yang di jalan Pemuda No.3 tidak dapat lagi menampung banyaknya koleksi di museum, hingga pada tahun 1977 secara resmi museum Mpu Tantular menempati gedung baru di jalan Taman Mayangkara No.6 Surabaya. Dengan adanya berbagai kegiatan di museum, membuat pihak museum perlu memperluas wilayah kembali, hingga pada akhirnya tanggal 14 Mei 2004 Museum Mpu Tantular resmi menempati gedung baru di jalan Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Banyaknya barang koleksi di dalam museum Mpu Tantular seperti salah satu contohnya yaitu serat naskah kuno, dimana naskah kuno tersebut merupakan sebuah kitab atau tulisan yang menggambarkan situasi dan kondisi pada saat itu bahkan menjelaskan mengenai ajaran kuno para leluhur mengenai kehidupan. Berikut beberapa serat naskah kuno di museum Mpu Tantular (Widjajanto:2008): (1) Serat Yusuf berbahan daun lontar berbahasa Jawa Kuno; (2) Serat Yusuf berbahan kertas bertulisan Arab dan Jawa kuno; (3) Al-Quran beserta tafsirnya berbahan kertas; (4) Serat Ramayana berbahan daun lontar berbahasa Jawa Kuno; (5) Serat Ramayana berbahan kertas berbahasa Arab dan Jawa kuno; (6) Mi'raj Nabi berbahan kertas dengan huruf Arab; (7) Babad berbahan kertas dengan bahasa arab dan Jawa Kuno; (8) Primbon berbahan kertas dan lontar berbahasa Jawa Kuno; (9) Kitab-kitab Islam berbahan kertas berbahasa Arab dan (10) Sejarah Nabi Muhammad berbahan kertas berbahasa Arab.

Masih banyak lagi koleksi naskah kuno yang terdapat didalam museum Mpu Tantular. Hal ini lah yang membuat museum Mpu Tantular menjadi tempat wisata edukasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama anak-anak untuk mengetahui sejarah dan nilai budaya yang ada di Indonesia sebagai bahan pengetahuan dan wawasan terkait sejarah Indonesia.

Berikut dijelaskan hasil dan pembahasan dari berbagai sumber dalam penelitian dimana dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak pengelola museum Mpu Tantular pada tanggal 13 April 2021.

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Mengenai Museum Pada Museum Mpu Tantular

Penyebab Museum Mpu Tantular Tidak Eksis Seperti Dahulu.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menjawab dari pertanyaan penelitian ini, penyebab museum tersebut tidak kembali eksis dikarenakan oleh minimnya minat masyarakat terhadap kunjungan ke museum, sehingga pengunjung museum pun menjadi

berkurang. Lalu penyebab selanjutnya yaitu tidak adanya perawatan yang baik terhadap kondisi museum Mpu Tantular. Hal ini pun dipengaruhi oleh berkurangnya sumber daya manusia yang bekerja di museum Mpu Tantular tersebut, berdasarkan hasil wawancara pada awalnya karyawan di museum Mpu Tantular terdapat sebanyak 70 pekerja, sementara saat ini hanya bersisakan 24 pekerja di museum. Hal ini tentu mempengaruhi tata kelola dan perawatan umum museum. Dari penyebab tersebut sebenarnya terdapat penyebab utama yang menyebabkan museum Mpu Tantular tidak kembali eksistensi seperti dahulu lagi, yaitu generasi muda yang terbawa arus perkembangan globalisasi, aturan yang masih kurang menekankan pada efektivitas kegiatan museum, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan museum Mpu Tantular tidak kembali mengepakkan sayapnya ditengah masyarakat. Padahal apabila dilihat dari perspektif ilmu sejarah, museum Mpu Tantular memiliki koleksi yang sangat banyak dan juga memiliki nilai yang tinggi, terdapat banyak koleksi yang dimiliki museum tersebut dimulai dari benda peninggalan kerajaan hingga naskah kuno yang masih tersimpan rapi oleh museum Mpu Tantular.

Apabila museum seperti museum Mpu Tantular tidak terawat dengan baik maka hasil yang akan diterima oleh masyarakat dan negara adalah hilangnya nilai budaya dan sejarah terhadap benda-benda yang menjadi pusaka berharga negara sebagai tonggak sejarah yang dapat menjadikan suatu ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Solusi yang tepat adalah membenahi dan melestarikan kembali museum tersebut agar menjadi tempat yang kembali baik dan nyaman untuk dijadikan rekreasi wisata edukasi bagi masyarakat.

Faktor Yang Menjadi Penghambat Jalannya Kegiatan Museum Mpu Tantular

Hasil wawancara menunjukan terdapat faktor yang menghambat jalannya kegiatan museum Mpu Tantular pada saat ini. Banyak faktor yang menghambat kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh pihak museum untuk melayani dan memberikan edukasi pada pengunjung. Faktor utama pada saat ini adalah Virus Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara, pihak museum mengatakan bahwa saat ini museum tidak tutup, museum tetap beroperasi meskipun tidak ada pengunjung yang datang dikarenakan pihak museum mengikuti aturan pemerintah mengenai protocol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran virus corona.

Bahkan para pegawai yang bekerja di museum Mpu Tantular pun terpaksa ada yang dikeluarkan dan ada yang dipekerjakan di rumah, hal tersebut karena minimnya pemasukan pada museum yang menjadi sumber penghasilan utama bagi para pegawai dan pihak museum. Tetapi semenjak 17 Maret 2020 hingga saat ini terpaksa mereka membatasi kunjungan masyarakat ke museum tersebut, karena menjaga kawasan dari kerumunan demi menjaga dan meminimalisir penularan virus corona. Terkait berita yang beredar di Indonesia memiliki dampak yang sama yakni dikarenakan adanya pandemic yang sangat berpengaruh terhadap pemasukan anggaran. Anggaran dari pemerintah tentunya lebih

memprioritaskan bidang-bidang yang sangat penting pada masa ini, yakni seperti kesehatan dan lainnya.

Dari hasil wawancara terkait faktor yang menghambat kegiatan museum Mpu Tantular saat ini, sebenarnya terdapat solusi yang baik untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, yaitu dengan menjalankan aktivitas dengan cara *online*, seperti memposting-postingan bersejarah di media sosial, dan foto-foto terkait dengan benda bersejarah yang terdapat didalam museum tersebut. Pihak museum pun dapat membuat platform yang berisikan mengenai museum, bisa melalui *youtube, Instagram*, atau media lainnya untuk mempublikasikan museum Mpu Tantular agar dapat disaksikan oleh masyarakat kembali.

Evaluasi Kebijakan Terhadap Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2015

Dari penerapan dan implementasi yang dilakukan oleh pihak museum Mpu Tantular, merujuk pada Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2015 tentang pengelolaan museum dan pelestarian cagar budaya. Didalam aturan tersebut mengatakan untuk menjaga dan mengawasi serta melestarikan museum sebagai cagar budaya yang menjaga dan melestarikan nilai budaya tersebut.

Implementasi peraturan tersebut dalam keberlangsungan museum Mpu Tantular sejauh ini tidak terimplementasikan dengan baik. Pasalnya praktik kerja museum dilapangan secara langsung bertolak belakang dengan apa yang terdapat didalam peraturan No.66 Tahun 2015 tersebut, karena hingga saat ini tidak adanya pengawasan dan bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pemerintahnya sendiri. Sehingga dapat dilihat kondisi keadaan museum Mpu Tantular saat ini sangat memprihatinkan, banyak bagian-bagian gedung yang tidak terawat, hal ini yang membuat implementasi dari peraturan pemerintah tersebut tidak berjalan dengan baik.

Keterangan lainnya pun terdapat ketika wawancara dengan bagian Humas Museum Mpu Tantular, bahwa anggaran untuk museum diperoleh dari dana APBD Jawa Timur dan non fisik. Berbanding terbalik dengan apa yang ada didalam peraturan pemerintah tersebut, hal ini menunjukkan tidak terdapatnya implementasi yang baik dari peraturan pemerintah dalam kondisi lapangan secara langsung.

Maka dari itu perlu diadakannya evaluasi mengenai implementasi peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2015 Tentang museum tersebut. Tujuannya agar museum-museum lainnya di Indonesia mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah pusat juga dapat dijadikan sebagai tempat edukasi yang memiliki harga dan citra yang baik dimata masyarakat. pentingnya evaluasi ini untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi selama peraturan tersebut diimplementasikan oleh pihak museum. Harapannya adalah untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebab hilangnya eksistensi museum Mpu Tantular yaitu pengaruh perkembangan zaman dimana saat ini generasi muda lebih memilih untuk memainkan *gadget* mereka dibandingkan mencari ilmu pengetahuan mengenai sejarah ke museum secara langsung. Serta penyebab lainnya adalah perawatan yang masih kurang terhadap kondisi museum Mpu tantular dimana saat ini kondisi museum Mpu Tantular sangat memprihatinkan.
2. Hambatan yang menjadi faktor utama dalam setiap kegiatan museum yaitu pandemic Covid-19, dimana pandemic menjadi faktor utama yang menghambat kinerja sehari-hari museum. Tidak seperti biasanya museum biasa mengadakan kegiatan bersama mengenai budaya, tetapi saat ini museum tidak dapat melaksanakannya karena peraturan pemerintah yang melarang satu tempat menampung kerumunan orang yang banyak, untuk meminimalisir penyebaran virus corona di Indonesia.
3. Evaluasi terhadap peraturan pemerintah yang menjadi implementasi dalam berjalannya sebuah museum terutama museum Mpu Tantular harus dibenahi, pasalnya peraturan tersebut tidak terimplementasikan dengan baik di museum Mpu Tantular.

SARAN

Saran peneliti untuk masyarakat yaitu sebaiknya masyarakat menjaga eksistensi museum Mpu Tantular karena museum tersebut merupakan warisan budaya milik masyarakat Surabaya khususnya dimana museum Mpu Tantular menjadi pusat cagar budaya sejak zaman dulu hingga sekarang, tetapi akan terasa sia-sia apabila tidak dapat di lestarikan dengan baik. Saran untuk pemerintah yaitu sebaiknya mengevaluasi terhadap peraturan pemerintah no.66 tahun 2015 tentang museum tersebut dikarenakan tidak adanya implementasi yang baik bagi setiap museum dan cagar budaya yang ada di Indonesia.

REFERENSI

- Christanto, J. (2020). Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan . *Modul IPWKL4220/MODUL 1* .
- Dewi, F. L. (2016). Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya . *AntroUnairdotNet*, Vol. /No.3, 588.
- Fithroni, M. S. (2021). Identifikasi Minat Pengunjung Museum Mpu Tantular Terhadap permainan Tradisional . *Jurnal Kesehatan Olahraga* Vol. 09. No. 01, 311-318.
- ICOMOS. (1999). *The Burra Charter*. . Australia : ICOMOS Inc.
- Kebudayaan, P. P. (2006). *Buku Panduan Museum Mpu Tantular*. Surabaya: Tim Program Penunjang Pendidikan dan Kebudayaan Museum Mpu Tantular.

- La Ode Muhammad Elwan, S. (2011). IMPLEMENTASI PERDA KOTA KENDARI NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2010. Universitas Gadjah Mada.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya
- Muhktar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press.
- Murtagh, W. J. (1988). *Keeping Time, the history and theory of preservation in America*. Pittstown.: The Main Street Press.
- Nara, E. S. (2011). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhanifah Surya Ningrum, U. S. (2016). Pengelolaan Benda Cagar Budaya di Museum Ronggowarsito Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Diponegoro . *Law Review Vol.5 No.2* .
- Rachman, M. (2012). Konservasi Nilai dan Warisan Budaya Indonesian . *Journal of Conservation Vol. 1 No. 1* , 30-29.
- Rahmawati, Y. (2018). *Pengertian Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya* . Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Samedi. (2015). Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia . *JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 2 ISSUE 2*.
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Soetopo., H. (2005). *Pendidikan Pembelajaran (Teori, Permasalahan dan Praktek)*. Malang: UMM Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriharjo, V. A. (2012). Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat. *JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1* , .
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>
- Widjajanto, K. A. (2008). *Filologi dan Manuskrip; Menelusuri Jejak Warisan Islam Nusantara*. Surabaya: LP2FA.